

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan memberikan suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lyncolin Arsyad, 1999:108).

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari pembangunan nasional dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan pelaksanaan yang adil dan merata. Dengan demikian setiap daerah akan memerlukan suatu kebijakan yang nantinya dapat membuat daerah tersebut dapat berupaya untuk meningkatkan kemampuan daerahnya untuk menghadapi tantangan dan mengembangkan potensi yang ada.

Sebelumnya, pembangunan hanya dilaksanakan dan diatur oleh pemerintah pusat yang membuat terjadinya sistem sentralistik sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan pendapatan dan keuangan antara pusat dan daerah. Sumberdaya yang cukup potensial yang dimiliki daerah sebagian besar dikirim ke pusat, padahal semestinya sumber daya daerah yang besar dikelola secara mandiri oleh daerah demi kesejahteraan masyarakat daerah.

Melihat besarnya potensi yang ada di dalam daerah, pemerintah pusat berupaya untuk menampung aspirasi yang ada pada daerah dan mengeluarkan TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; Serta Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai arahan untuk UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Dengan lahirnya Undang-undang tersebut ditandai sebagai landasan awal dimulainya masa desentralisasi dan menggantikan sistem sentralisasi di Indonesia. Suatu daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri dengan mendasarkan pada prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga suatu daerah harus jeli dalam memberdayakan potensi alam setempat agar lebih berdaya dan berhasil guna, sehingga suatu Daerah memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan daerah yang lain.

Pengertian desentralisasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari Otonomi daerah sesuai dengan prinsip Negara kesatuan, otonomi daerah diwujudkan sebagai hasil dari pendelegasian sebagian urusan pusat yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, terdapat batasan-batasan di dalam otonomi daerah yaitu daerah hanya diberikan kewenangan

mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kepentingan masyarakat daerah, dikecualikan untuk urusan-urusan yang mutlak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan politik luar negeri, urusan moneter dan fiskal nasional, urusan yustisi, dan urusan agama.

Dengan dimulainya masa desentralisasi dan otonomi daerah tersebut maka daerah diberikan wewenang yang luas untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat untuk mengatur daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, selain itu daerah juga diberikan kebebasan untuk mengelola keuangan yang memadai dengan tujuan untuk sasaran pembangunan (Kuncoro, 2004) seperti:

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah
2. Meningkatkan pendapatan perkapita
3. Mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan

Sesuai dengan tujuan lahirnya Undang-undang tentang pelaksanaan desentralisasi maka diharapkan daerah dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah seperti kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan dan juga kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat membuat daerah menggali dan menemukan potensi dan keunggulan yang ada pada daerahnya sehingga dapat dijadikan sebagai basis perekonomian yang unggul.

Selama pembangunan berlangsung, terjadi pula perubahan dan pergeseran diantara sektor dalam satu wilayah. Untuk mengetahui perubahan

dan pergeseran struktur ekonomi wilayah tersebut, dapat menggunakan tinjauan teori ekonomi basis, dimana akan ada sektor yang berfluktuasi menjadi sektor basis dan non basis. Selanjutnya sektor-sektor tersebut dapat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang lebih luas. Apabila komponen pertumbuhan proporsional suatu sektor positif, maka sektor yang bersangkutan cepat pertumbuhannya, dan memberikan pengaruh yang positif kepada perekonomian yang lebih luas, dan hal ini berlaku sebaliknya. Untuk komponen pertumbuhan daya saing wilayah jika nilainya untuk suatu sektor positif, maka keunggulan komparatif dari sektor tersebut meningkat dalam perekonomian wilayah yang lebih luas, demikian pula sebaliknya.

Sehubungan dengan perencanaan pembangunan di suatu daerah maka sejak tahun 1974 dibentuklah sebuah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tiap-tiap propinsi yang bertugas membantu Gubernur dalam membuat perencanaan, pengawasan dan koordinasi dari proyek-proyek sektoral yang ada di daerah. Dan pada tahun 1980 dibentuk pula BAPPEDA Tingkat II yang membantu Bupati dan Walikota di daerahnya masing-masing.

Memperhatikan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah potensi wilayah, daya dukung lingkungan dan struktur ekonomi, dengan mengambil daerah penelitian di Kabupaten Boyolali. Adapun judul dalam skripsi ini adalah: “ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN DAN STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN BOYOLALI “.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana daya dukung lahan di Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana struktur ekonomi di Kabupaten Boyolali?
3. Sektor manakah yang menjadi sektor basis di Kabupaten Boyolali?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui daya dukung lahan di Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui struktur ekonomi di Kabupaten Boyolali.
3. Untuk mengetahui sektor manakah yang menjadi sektor basis di Kabupaten Boyolali.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi kalangan akademisi, hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan daerah maupun sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Memberi informasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dalam menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
3. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai daya dukung lahan, deskripsi struktur ekonomi, serta sektor atau subsektor yang mempunyai potensi di Kabupaten Boyolali.
4. Bagi penulis, sebagai aplikasi dan penerapan teori ekonomi pembangunan yang penulis dapatkan selama duduk di bangku kuliah.

